

TUGAS AKHIR

PENGARUH JUMLAH PKP, SPT MASA PPN DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PPN TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

NUR MUHAMAD ASRIADI (015 04 033)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
TAHUN 2018**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH JUMLAH PKP, SPT MASA PPN DAN SURAT
TAGIHAN PAJAK PPN TERHADAP PENERIMAAN PPN
PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

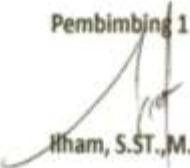
Oleh:

NUR MUHAMAD ASRIADI (015 04 033)

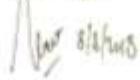
Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu
syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

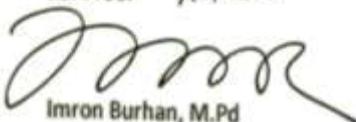

Ilham, S.ST., M.Ak.

Pembimbing 2


Veronika Sari Denka, S.ST

Mengetahui,

Ka. Prodi 7/8/2020


Imron Burhan, M.Pd

 rektur
**POLITEKNIK
BOSOWA**
DRS. H. DJUSDIL AKRIM, M.M

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NUR MUHAMAD ASRIADI NIM: 015 04 033

Dengan judul :

PENGARUH JUMLAH PKP, SPT MASA PPN DAN SURAT TAGIHAN
PAJAK PPN TERHADAP PENERIMAAN PPN PADA KPP PRATAMA
MAKASSAR SELATAN

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 29 Agustus 2018

Nama Mahasiswa

1. NUR MUHAMAD ASRIADI



ABSTRAK

Nur Muhamad Asriadi, Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan (dibimbing oleh Ilham, dan Veronika Sari Den Ka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN baik pengujian secara parsial maupun secara simultan pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2012-2017. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa jumlah PKP, SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak PPN dan penerimaan PPN dalam periode 2012-2017 yang bersumber dari KPP Pratama Makassar Selatan. Metode pengambilan data dalam penelitian adalah dokumentasi dengan cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Quota Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi dengan jumlah sampel 60 buah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, 2) SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, 3) Surat Tagihan Pajak PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN, 4) Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Kata kunci : Jumlah PKP, SPT Masa PPN, Surat Tagihan Pajak PPN, Penerimaan PPN

ABSTRACT

Nur Muhamad Asriadi, *Influence of the amount of VAT Enterprises, VAT periodic tax returns and notice of Tax Collection Letter on VAT Revenue on Primary Tax Office Makassar Selatan (Supervised by Ilham, and Veronika Sari Den Ka)*

This study aims to determine the effect of the amount of VAT Enterprises, VAT periodic tax returns and notice of Tax Collection Letter on the acceptance of VAT either partially or simultaneously test on Primary Tax Office Makassar Selatan in 2012-2017. The type of data used is primary data in the amount of VAT Enterprises, VAT periodic tax returns, notice of Tax Collection Letter and Revenue of VAT in the period 2012-2017 sourced from Primary Tax Office Makassar Selatan. Data retrieval method in research is documentation by obtaining data direct from location of research. Sampling method in this study is Quota Sampling with a sample of 60. Data analysis techniques used in this study is a linear regression linear statistical analysis. The result of the research shows that 1) The amount of VAT Enterprises partially has a positive and significant effect on the VAT revenue, 2) The VAT periodic tax return partially has no effect on the receipt of VAT, 3) The notice of Tax Collection Letter partially has no effect on the receipt of VAT, 4) The Entrepreneur Tax Payer for VAT Purposes, VAT periodic tax returns and notice of Tax Collection Letters imultaneously affect the acceptance of VAT.

Key Words: VAT Enterprises, VAT periodic tax returns, Notice of tax collection VAT, VAT Revenue

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat, kenikmatan, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas Akhir ini dibuat untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis selama melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan yang merupakan kewajiban akademik selama menempuh pendidikan akhir pada Politeknik Bosowa. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan pada arahan kepada penulis selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, antara lain :

1. Orang Tua yang tulus memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Drs. H. Djudsil Akrim selaku Direktur Politeknik Bosowa
3. Bapak Imron Burhan,S.Pd.,M.Pd.selaku Ketua Program Studi Perpajakan
4. Ibu Sri Nirmala Sari, SE.,M,Si selaku wali kelas yang telah banyak memotivasi penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
5. Bapak Ilham, S.ST., selaku Ketua Komisi TA dan Pembimbing I yang telah memberikan fasilitas dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan ikhlas kepada penulis.
7. Dosen-dosen Politeknik Bosowa yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Teman tercinta serta dan segala pihak yang banyak memberikan motivasi dan dorongan serta bantuan, baik secara moral maupun spiritual.

Penulisan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif. Demikian Tugas Akhir ini, atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, Agustus 2018

Nur Muhamad Asriadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Tugas Akhir	4
1.5. Manfaat Tugas Akhir	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	7
2.2 Teori Dasar	11
2.2.1. Sejarah Undang-Undang PPN.....	11
2.2.2. Pengertian PPN, BKP, dan JKP.....	11
2.2.3. Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak atas PPN	12
2.2.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	13
2.2.5. Surat Pemberitahuan Masa PPN.....	17
2.2.6. Surat Tagihan Pajak (STP).....	18
2.3 Kerangka Berpikir	20
2.4 Hipotesis.....	22

BAB III.METODE PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	27
3.2 Diagram Alir Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Prosedur Pengambilan Data & Sampel.....	28
3.5 Teknik Analisis Data	29
BAB IV.PEMBAHASAN.....	35
4.1 Profil Perusahaan.....	35
4.1.1 Sejarah Organisasi	35
4.1.2 Tugas dan Fungsi	36
4.1.3 Struktur Organisasi	37
4.1.4 Wilayah Kerja	41
4.2 Pengolahan Data	45
4.2.1 Deskripsi Variabel Penelitian	45
4.2.2 Analisis Regresi Berganda.....	49
4.3 Hasil Analisis Data.....	58
4.3.1 Pengaruh PKP terhadap Penerimaan PPN.....	58
4.3.2 Pengaruh SPT Masa PPN terhadap Penerimaan PPN...59	59
4.3.3 Pengaruh STP PPN terhadap Penerimaan PPN	60
4.3.4 Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN	60
BAB V.PENUTUP	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah PKP	45
Tabel IV.2 SPT Masa PPN.....	46
Tabel IV.3 Surat Tagihan Pajak PPN	47
Tabel IV.4 Penerimaan PPN.....	48
Tabel IV.5 Uji Normalitas	50
Tabel IV.6 Uji Multikolinearitas	51
Tabel IV.7 Uji Auto Korelasi.....	54
Tabel IV.8 Uji T	54
Tabel IV.9 Uji F	56
Tabel IV.10 Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Roadmap penelitian	10
Gambar II.2 Surat Tagihan Pajak	18
Gambar II.3 Kerangka Berfikir	21
Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian.....	27
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	38
Gambar IV.2 Uji Normalitas	50
Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Jumlah PKP
- Lampiran 2 SPT Masa PPN Terlapor
- Lampiran 3 Penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN
- Lampiran 4 Penerimaan PPN
- Lampiran 5 Tabel Distribusi F
- Lampiran 6 Tabel Distribusi T
- Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 8 Uji Notmalitas
- Lampiran 9 Uji Multikolineritas
- Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 11 Uji Auto Korelasi
- Lampiran 12 Analsis regresi Berganda
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pendapatan suatu negara mencerminkan bagaimana negara tersebut untuk maju. Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya negara yang dibebankan kepada masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik pada Realisasi Penerimaan Negara, penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.495 Triliun dengan tingkat realisasi 91% dari target yang telah ditetapkan dan mengalami pertumbuhan 4,3% dibandingkan tahun 2016 [1]. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak. PPN merupakan pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di dalam daerah pabeaan.

PPN memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2017 PPN merupakan penyumbang pendapatan terbesar kedua dari sektor penerimaan pajak setelah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 493 Miliar dengan tingkat kontribusi 33% dari jumlah penerimaan pajak dalam negeri [1]. Salah satu pihak yang mempunyai wewenang dalam memotong atau memungut PPN yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan

Nilai [2]. Menurut Siti Resmi menyatakan bahwa dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan PPN [3].

Namun berbeda dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis (2016) menyimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu kewajiban pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir yang digunakan oleh PKP untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Semakin banyaknya PKP yang melaporkan SPT Masa PPN untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak [4]. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurrokhman (2014) yang menyimpulkan bahwa jumlah surat pemberitahuan masa berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono menyatakan bahwa salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah adanya kesalahan dari WP atau PKP seperti bukan PKP menerbitkan faktur pajak, faktur pajak tidak lengkap, kesalahan hitung dan lain-lain yang mengakibatkan DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak [5].

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda [4]. Penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2014) dan Pandiangan (2014), menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN memiliki pengaruh negatif (tidak searah) dan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Karena semakin banyak Surat Tagihan Pajak PPN yang diterbitkan belum tentu menambah penerimaan PPN, hal ini disebabkan sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah [6].

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Giani (2016), menyimpulkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Dimana ketika jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak bertambah maka penerimaan PPN akan mengalami kenaikan [5].

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan”

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan ?
- b. Bagaimana pengaruh SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan ?
- c. Bagaimana pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan?

- d. Bagaimana pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan ?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi tempat penelitian dan variabelnya. Tempat penelitian dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan. Jumlah PKP adalah jumlah PKP yang terdaftar selama 2012-2017. SPT Masa PPN adalah semua SPT Masa PPN yang dilaporkan selama 2012-2017. Surat Tagihan Pajak adalah Surat Tagihan Pajak PPN yang diterbitkan selama 2012-2017. Penerimaan PPN adalah penerimaan PPN selama 2012-2017.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN secara simultan terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan

1.5. Manfaat Tugas Akhir

1.5.1. Bagi Penulis

- a. Dengan memperoleh pengalaman langsung di KPP Pratama Makassar Selatan , penulis lebih mengetahui dan dapat menambah lebih mendalam tentang pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Prtama Makassar Selatan.

1.5.2. Bagi Instansi

- a. Diharapkan sebagai bahan masukan dan evaluasi serta manfaat bagi KPP Pratama Makassar Selatan mengenai pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN.

1.5.3. Bagi Akademisi

- a. Politeknik Bosowa, yaitu memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan perpajakan.
- b. Peneliti lain, yaitu adanya referensi untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Roadmap* Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurrokhman (2014) dengan metode statistik dekriptif dan regresi linear yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Semarang” dengan tujuan untuk menguji variabel independennya yaitu Jumlah PKP dan SPT Masa PPN terhadap variabel dependen yaitu Penerimaan PPN secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan cenderung mengalami peningkatan 2009-2012. [7]

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016) dengan metode statistik dekriptif dan regresi linear berganda yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Kota” dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel jumlah PKP dan SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN baik secara parsial maupun secara simultan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini mengidentifikasi bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya, hal ni dapat terjadi karena Pengusaha Kena Pajak diperoleh atau tidak dirasakan oleh

semua wajib pajak. 2) Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. [8]

Penelitian yang dilakukan oleh Giani (2016) dengan metode regresi linear berganda yang berjudul “Pengaruh Surat Tagihan Pajak Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Purwakarta”, dengan tujuan untuk mencari kebenaran atas pengaruh Surat Tagihan Pajak dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 2) Jumlah PKP berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Dimana ketika jumlah PKP meningkat maka penerimaan PPN pun akan meningkat. [5]

Penelitian yang dilakukan oleh Pandiangan (2014) dengan metode statistik regresi linear berganda yang berjudul “Pengaruh SKPKB, Surat Tagihan Pajak, Jumlah PKP, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPN”, dengan tujuan penelitian yaitu untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik pengujian secara parsial maupun simultan tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) PKP terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. 2) STP

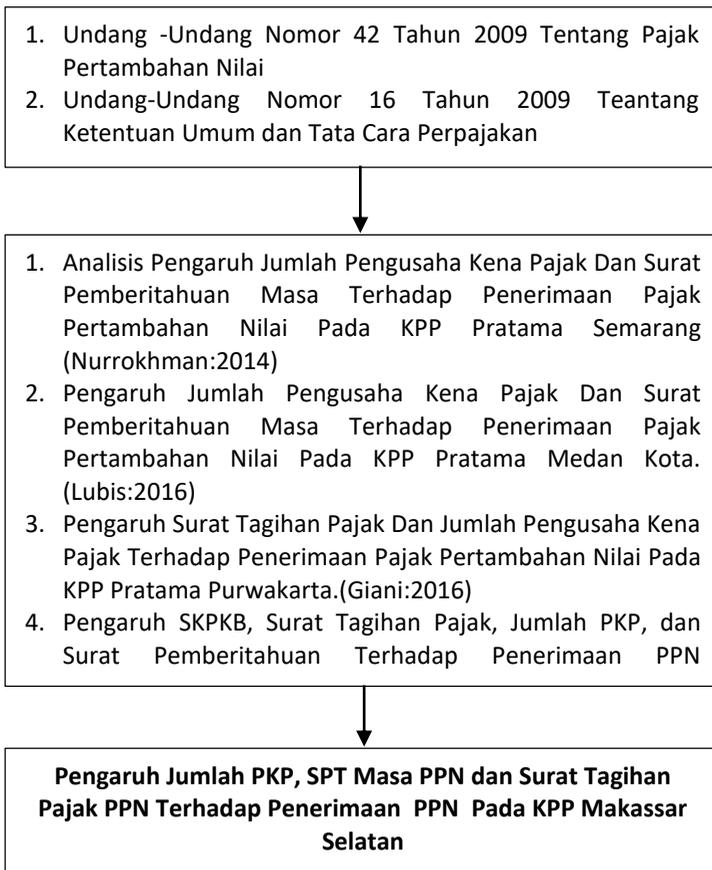
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda negatif. STP diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. Oleh karena itu, presentase untuk penagihan STP sangat kecil sehingga tidak berdampak pada penerimaan PPN. [9]

Penelitian yang dilakukan oleh Kresna (2013) dengan metode statistik regresi linear berganda yang berjudul “Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN”, dengan tujuan untuk menguji kembali apakah terdapat pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik pengujian secara parsial maupun simultan, tetapi dengan objek dan rentang waktu yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) PKP Terdaftar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Jadi, semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. 2) STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. STP PPN diterbitkan bagi PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagian besar PKP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut merupakan PKP yang bermasalah. [6]

Berikut ini adalah roadmap penelitian yang dikemukakan penulis mengenai gambaran judul “Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Makassar Selatan”, dimana PKP, SPT dan Surat Tagihan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP, jumlah SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan. Setelah itu ditarik kesimpulan atas pengaruh jumlah PKP, jumlah SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan.



Gambar II.1 Roadmap penelitian

2.2 Teori Dasar

2.2.1. Sejarah Undang-Undang PPN

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

2.2.2. Pengertian PPN, Barang Kena Pajak (BKP), dan Jasa Kena Pajak (JKP)

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi [2].

- b. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukunya dapat berupa barang bergerak atau barang

tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. [4].

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah setiap jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. [10].

2.2.3. Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak atas PPN

Tarif PPN Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

- a. Tarif PPN sebesar 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impор BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- b. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor JKP.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. DPP terdiri atas:

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN.
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai DPP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013.

2.2.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

- a. Pengertian PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP [10]. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean [2].

b. Syarat Pengukuhan PKP

Berdasarkan ketentuan PMK NO.197/PMK.03/2013 menjelaskan bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) [11].

Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya [12].

c. Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP menjelaskan penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh dalam kegiatan ekstensifikasi [13]. Adapun pemeriksaan yang harus dipenuhi untuk pengukuhan PKP secara jabatan yaitu :

- a) Pengujian pemenuhan persyaratan subjektif meliputi :
 - a. Pengujian atas kelengkapan dokumen terkait identitas pengusaha antara lain KTP pengusaha, KTP pengurus, akta pendirian dan Surat Keterangan Domisili.
 - b. Pengujian atas kebenaran status pengusaha, kebenaran alamat pengusaha, dan kebenaran keberadaan pengusaha yang bersangkutan di alamat tersebut antara lain peta lokasi kegiatan usaha dan foto tempat kegiatan usaha.
- b) Pengujian pemenuhan persyaratan objektif meliputi :
 - a. Pengujian atas kelengkapan dokumen izin kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya surat izin usaha perdagangan dan surat izin usaha jasa konstruksi
 - b. Pengujian terhadap kesesuaian antara dokumen izin kegiatan usaha dengan kegiatan usaha yang

dilakukan untuk memperoleh informasi antara lain mengenai gambaran kegiatan usaha, data peredaran usaha dan daftar harta di tempat kegiatan usaha.

d. Kewajiban PKP

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang
4. Melaporkan perhitungan pajak

e. Pengaruh terhadap Penerimaan PPN

Menurut Siti Resmi, dengan banyaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai [14]. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Teori tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Giani (2016) dan Kresna (2014) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

2.2.5. Surat Pemberitahuan Masa PPN

a. Pengertian SPT

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peundang-undangan perpajakan (Susyanti, 2015; 21) [15].

b. Tanggal-tanggal terkait PPN

- a) Tanggal 30 yaitu batas pelaporan jumlah transaksi yang terjadi dalam satu masa pajak.
- b) Tanggal 10 yaitu batas penyetoran SPT Masa PPN setelah masa pajak berakhir.
- c) Tanggal 20 yaitu batas pelaporan SPT Masa PPN setelah masa pajak berakhir.

c. Pengaruh terhadap penerimaan PPN

Menurut Mardiasmo, SPT Masa PPN merupakan surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak untuk suatu masa pajak. Semakin banyaknya WP yang melaporkan SPT untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak [14]. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Nurrokhman (2014) dan Lubis (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara SPT Masa PPN terhadap penerimaan PPN.

2.2.6. Surat Tagihan Pajak (STP)

a. Pengertian Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda [16].



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA		
Nomor Masa Pajak		Tanggal Penerbitan Tanggal Jatuh Tempo
<p>1. Tujuan dilakukannya penertarikan pernyataan ini adalah pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.</p> <p>Nama Wajib Pajak/PMP : AP/VP :</p> <p>2. Dari penertarikan pernyataan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH BENJURUT
		PENCUSAHA/UMMA PAJAK PISKUS
1	Pajak harus dibayar (bagi kecil):	
2	Telah dibayar	
3	Kurang dibayar (1-2)	
4	Sanksi Administrasi:	
	a. Denda Pasal 7 KUP	
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	
	d. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP	
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP	
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4+5)	
Tetaplah :		

Kepala _____

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kantor Kantor
Kantor Kantor _____

Gambar II.2 Surat Tagihan Pajak

b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
3. WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu

c. Tanggal-tanggal terkait Surat Tagihan Pajak

1. Tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak yaitu setelah lewat satu bulan sejak masa pajak yang bersangkutan.
2. Tanggal pelunasan Surat Tagihan Pajak paling lama satu bulan sejak tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak

d. Pengaruh terhadap Penerimaan PPN

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014) dalam Nabila (2016) mengemukakan bahwa “Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak adalah hasil dari penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan pajak dengan surat tagihan pajak maupun dengan surat paksa. [17]” Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Giani (2016) dan Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

2.3 Kerangka Berpikir

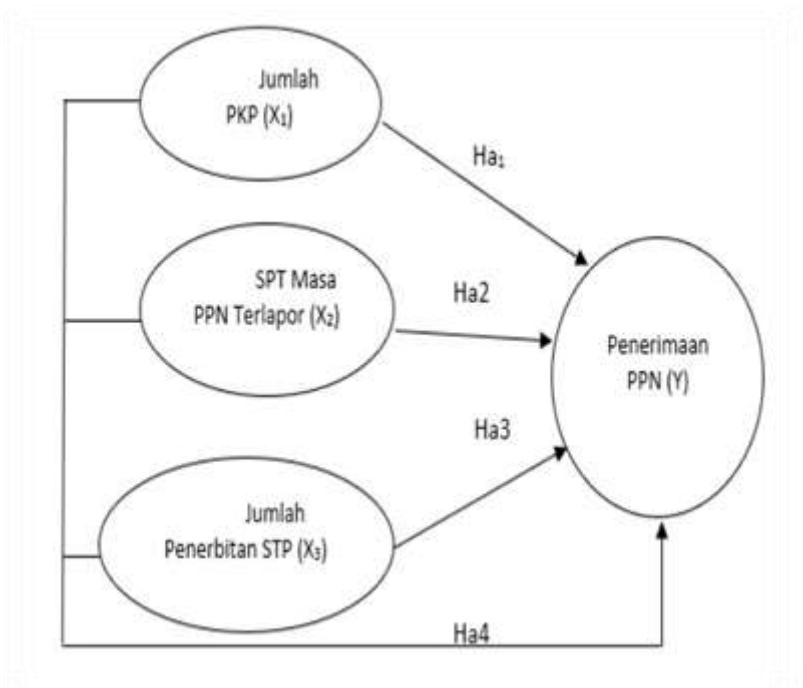
Salah satu pihak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan JKP dan BKP di dalam daerah pabean dan telah memenuhi ketentuan dan syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu penugsa kecil juga dapat dikukuhkan sebagai PKP apabila mengajukan agar dikukuhkan sebagai PKP. Ketentuan dan syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP telah diatur dalam PMK NO.197/PMK.03/2013 sehingga hal ini semakin memperluas subjek pajak yang dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan membantu meningkatkan penerimaan negara.

Kewajiban PKP ini diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kecuali bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT dilakukan pada hari kerja setelahnya. Dimana apabila bertambahnya jumlah PKP maka akan berdampak pada penerimaan SPT Masa PPN yang juga bertambah. Dengan bertambahnya penerimaan SPT Masa PPN maka juga akan mempengaruhi penerimaan PPN.

Dalam menyampaikan SPT Masa PPN dapat memungkinkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak seperti faktur pajak tidak lengkap dan adanya kesalahan hitung yang mengakibatkan DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Dengan bertambahnya penerbitan Surat Tagihan Pajak mengindikasikan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN yang mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan PPN. Oleh karena itu pihak DJP menerbitkan

Surat Tagihan Pajak untuk menagih pajak kurang bayar yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak yang akan mempengaruhi jumlah penerimaan PPN.

Adapun keterkaitan pengaruh hubungan penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dipaparkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar II.3 Kerangka Berfikir

Pada gambar II.3 dapat dilihat pengaruh dan hubungan penambahan PKP, SPT Masa PPN terlapor dan penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan PPN.

Peningkatan jumlah pengusaha akan berpotensi pada penambahan jumlah PKP. Semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP akan berdampak pada bertambahnya jumlah objek PPN yang dipotong/dipungut PPN sehingga akan berpengaruh pada tingkat penerimaan PPN.

Salah satu kewajiban PKP dalam memungut dan memotong PPN adalah melapor SPT Masa PPN yang dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi penambahan jumlah PKP maka akan berpengaruh pada jumlah pelaporan SPT Masa PPN karena semakin banyaknya PKP yang melaksanakan kewajibannya sehingga akan berdampak pada penerimaan PPN.

Jika dalam pelaporan SPT Masa PPN ditemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PKP seperti faktur pajak tidak lengkap dan kesalahan perhitungan matematis. Oleh karena itu pihak Direktorat Jendral Pajak berhak menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.

2.4 Hipotesis

Sugiyono mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik [18].

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menyusun hipotesis mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

2.4.1. Jumlah PKP dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh jumlah PKP dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Nurokhman (2014), Giani (2016), Pandiangan (2014), dan Kresna (2013) yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Lubis (2016) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah PKP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berfikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha₁ : Jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.4.2. SPT Masa PPN dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh SPT Masa PPN dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Nurokhman (2014) dan Lubis (2016) yang menyatakan bahwa SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Pandiangan (2014) mengungkapkan hal berbeda, yakni SPT Masa PPN tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berfikir dan hasil penelitian

sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Ha₂ : SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.4.3. Surat Tagihan Pajak PPN dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh Surat Tagihan Pajak PPN dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Giani (2016) dan Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Kresna (2013) mengungkapkan hal berbeda, yakni Surat Tagihan Pajak PPN tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka berpikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Ha₃ : Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN

2.4.4. Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN dengan Penerimaan PPN

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN dengan penerimaan PPN telah dilakukan oleh Pandiangan (2014) yang menyatakan bahwa jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan kerangka

berpikir dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

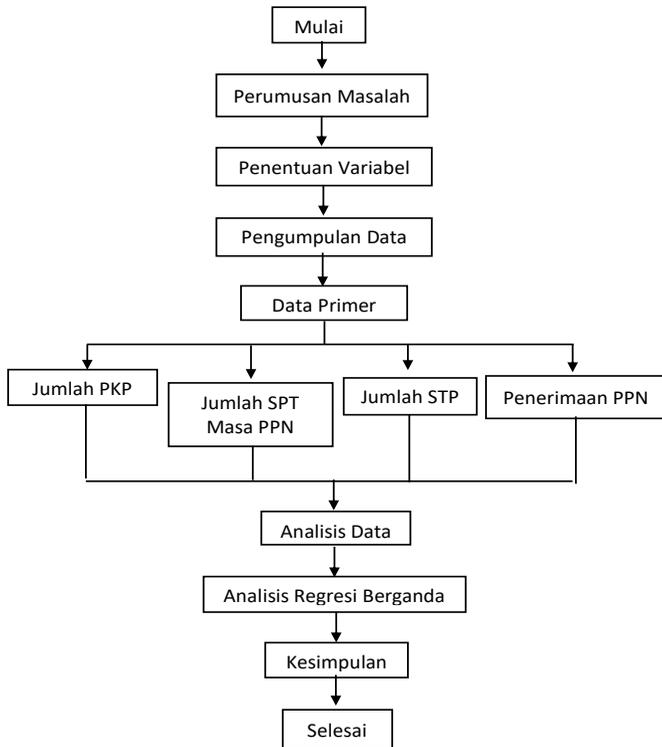
Ha₄ : Jumlah PKP,SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Agustus 2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Makassar Selatan yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo KM. 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

3.2 Diagram Alir Penelitian



Gambar III.1 Diagram Alir Penelitian

3.3 Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang bersifat angka, atau bisa juga bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan [19]. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah PKP yang terdaftar selama 2012-2017, jumlah SPT Masa PPN yang terlapor selama 2012-2017, jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN selama 2012-2017 dan jumlah penerimaan PPN selama 2012-2017.
- b. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data [19]. Sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada meliputi data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Makassar Selatan.

3.4 Prosedur Pengambilan Data & Sampel

Proses pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel kuota (*Quota Sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. *Quota Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah menetapkan tahun pengambilan data selama 2012-2017 dan menetapkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 60 bulan. Populasi

adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya [19].

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah PKP, SPT Masa PPN terlapor, Surat Tagihan Pajak PPN dan Penerimaan PPN. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa studi time series selama 5 tahun terakhir, maka sampel yang digunakan adalah jumlah PKP selama 2012-2017, SPT Masa PPN terlapor selama 2012-2017, penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN selama 2012-2017 dan Penerimaan PPN selama 2012-2017 dengan unit data tahunan yang dikonversikan menjadi bulanan maka jumlah seluruh sampel adalah 60 bulan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel independen yaitu jumlah PKP (X_1), SPT Masa PPN terlapor (X_2) dan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPN (Y).

Analisis tersebut untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Didalam penggunaan analisis regresi linear berganda, diperlukan beberapa pengujian terlebih dahulu yaitu pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

3.5.1. Pengujian Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independent (jumlah PKP (X_1), SPT Masa PPN terlapor (X_2) dan jumlah penerbitan STP (X_3)) dan variabel dependent (penerimaan PPN (Y)) mempunyai distribusi normal.

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas menurut Priyatno (2013) yaitu :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
 - 2) Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model asumsi normalitas tidak memenuhi uji asumsi normalitas.
- b. Uji Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel independent.

Untuk mengetahui hasil uji dari uji multikolinieritas dapat dilihat dari beberapa cara, yakni sebagai berikut :

- 1) Dengan melihat nilai tolerance:
 - a. Apabila nilai tolerancenya sendiri lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas

b. Sedangkan bila nilai tolerancinya lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulan yang didapat adalah terjadi multikolinieritas.

2) Dengan melihat nilai VIF:

a. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka kita akan mendapat kesimpulan bahwa data yang kita uji tersebut memiliki multikolinieritas

b. Sedangkan jika nilai VIF dibawah 10, maka kita akan mendapat kesimpulan bawa data yang kita uji tidak memiliki kolinieritas.

c. Rumus: $VIF=1/1-R^2$

c. Uji Heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Menurut Priyatno (2013) dasar pengambilan keputusannya adalah :

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel pengganggu. Dengan menggunakan

uji Durbin Watson (D-W) yang dimana menguji apakah dalam model regresi terjadi kesalahan pengganggu pada periode yang satu ke yang sebelumnya.

Dasar pengambilan keputusannya menurut Prof. Singgih adalah

- a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

3.5.2. Pengujian Hipotesis

- a. Uji Signifikan Parsial (Uji T) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu jumlah PKP (X_1), jumlah SPT Masa PPN terlapor (X_2) dan jumlah penerbitan STP (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPN (Y) secara parsial (masing-masing variabel).

Dasar pengambilan keputusannya menurut Priyatno (2013) adalah:

- 1) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - 2) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Uji Signifikan Simultan (Uji F) adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independent yaitu jumlah PKP (X_1), jumlah SPT Masa PPN terlapor (X_2) dan jumlah penerbitan STP (X_3) terhadap variabel dependen yaitu penerimaan PPN (Y) secara simultan (bersama-sama)

Dasar pengambilan keputusannya menurut Priyatno (2013) adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel independent (jumlah PKP (X_1), jumlah SPT Masa PPN terlapor (X_2) dan jumlah penerbitan STP (X_3)) dalam menjelaskan variabel dependen (penrimaan PPN (Y))

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja vertikal yang berada di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara yang berlokasi di kompleks Gedung Keuangan Negara Jalan Urip Sumoharjo KM 4, Makassar. Sebagai salah satu implementasi dari penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengubah secara structural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan pajak makassar.

Terhitung mulai tanggal 27 mei 2008, sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-95/PJ/UP.53/2008 19 mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. Salah satu perubahan nyata adalah penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan.

Dengan perubahan nama tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi mengalami perubahan menjadi 1 sub bagian, 9 seksi dan kelompok pejabat fungsional pemeriksa pajak.

4.1.2 Tugas dan Fungsi

KPP Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan lainnya;

- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelayanan perpajakan;
- f. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pembetulan ketetapan pajak;
- l. Pengurangan pajak bumi dan bangunan;
- m. Pelaksanaan administrasi kantor

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah KPP Pratama Makassar selatan

terhadap berbagai kegiatan alam ruang lingkup KKP Pratama Makassar selatan.

b. Fungsional Pemeriksa

Fungsional pemeriksa mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

c. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung

dengan Wajib Pajak melalui “Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT.

e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

g. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

j. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

4.1.4 Wilayah Kerja

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu KPP dari 3 KPP pratama di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.900 jiwa/km², jumlah penduduk 82.907 jiwa dengan luas wilayah 2.52 km² atau 1,43 % dari keseluruhan luas kota Makassar. Terdiri dari 14 kelurahan dengan geografis semua kelurahan bukan pantai. Luas wilayah kelurahan yang terbesar berada di kelurahan Maricaya yaitu masing-masing 0,26 km² sedang wilayah kelurahan yang paling kecil adalah kelurahan Maradekaya Selatan dan Bara-Baraya Utara yaitu masing-masing 0,11 km².

Penggunaan lahan di kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Kawasan pertokoan atau perkantoran berada di jalan Veteran dan jalan Gunung Latimojong.

Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

b. Kecamatan Panakukang

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,7 % dari luas keseluruhan wilayah kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km². Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Terdiri dari 11 kelurahan dengan geografis semua bukan pantai. Kelurahan yang paling luas adalah

kelurahan Pampang yaitu 2,63 km², sedangkan kelurahan yang memiliki luas terkecil adalah kelurahan Sinrijala dengan luas 0,17 km².

Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter.

Di kecamatan Panakkukang terdapat beberapa kawasan bisnis dan hiburan seperti Mall Panakkukang, Panakkukang Square, kawasan bisnis Boulevard serta beberapa hotel.

c. Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini berada di sisi selatan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25 % dari luas keseluruhan Kota Makassar dan terdiri dari 10 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah kelurahan Gunung Sari dengan luas 2,13 km² sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah kelurahan Bonto Makkio dengan luas wilayah 0,2 km².

Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman. Presentase penggunaan lahan sebagai kawasan pemukiman sangat besar hampir 65 %

sedangkan penggunaan lahan di sektor pertanian sebagai lahan sawah hanya seluas 20 ha (17 ha luas lahan panen). Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa kampus besar seperti Kampus Univeersitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah dan kampus-kampus lainnya.

d. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73 % dari luas keseluruhan wilayah kota Makassar dengan kepadatan penduduk 4.101 jiwa/km². Terdiri dari 6 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Tamanggapa 7,62 km², sedangkan kelurahan yang wilayahnya paling kecil adalah kelurahan Borong dan Batua.

Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2,22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain yakni 827 ha dan 411 ha dengan potensi produksi 4774,90 ton dan 1360,84 ton. Di sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil. Tahun 2008 produksinya hanya sekitar 59,10 ton atau senilai 1.156.200 rupiah.

Meskipun di sektor perikanan kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar. Untuk populasi ternak besar (sapi dan kerbau) 1352 ekor sedangkan untuk populasi ternak kecil (kambing) 1016 ekor.

4.2 Pengolahan Data

4.2.1 Variabel Penelitian

a. Jumlah PKP (X1)

Data jumlah PKP diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penambahan PKP perbulan, hasil deskripsi data jumlah PKP adalah seperti pada tabel berikut

Tabel IV.1 Jumlah PKP

Bulan	Jumlah PKP				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	2.157	2.787	3.299	3.923	4.488
Febuari	2.228	2.815	3.353	3.971	4.520
Maret	2.306	2.856	3.407	4.035	4.564
April	2.401	2.899	3.477	4.101	4.613
Mei	2.475	2.929	3.526	4.172	4.648
Juni	2.515	2.959	3.586	4.217	4.676
Juli	2.560	3.031	3.636	4.238	4.704
Agustus	2.599	3.088	3.685	4.297	4.752
September	2.639	3.153	3.730	4.342	4.783
Oktober	2.679	3.203	3.779	4.378	4.823
November	2.710	3.241	3.820	4.429	4.855
Desember	2.752	3.266	3.873	4.474	4.896

Sumber : KPP Prtama Makassar Selatan 2012-2017

Berdasarkan Tabel IV.1 diketahui bahwa variabel jumlah PKP pada KPP Pratama Makassar Selatan mengalami pertumbuhan 44% selama tahun 2012-2017.

b. SPT Masa PPN (X2)

Data SPT Masa PPN terlapor diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SPT Masa PPN terlapor perbulan, hasil deskripsi data SPT Masa PPN terlapor adalah seperti pada tabel berikut

Tabel IV.2 SPT Masa PPN

Bulan	SPT Masa PPN terlapor				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	2.257	2.502	2.620	3.012	2.766
Febuari	2.377	2.651	2.730	3.356	2.967
Maret	2.226	2.548	3.015	3.367	3.051
April	2.533	2.756	2.931	3.245	2.708
Mei	2.302	2.506	2.739	3.395	3.023
Juni	2.272	2.450	2.887	3.193	2.309
Juli	2.027	2.268	2.642	2.706	3.062
Agustus	2.149	2.540	2.810	2.198	2.915
September	2.310	2.623	2.751	2.450	2.938
Oktober	2.331	2.537	2.920	2.691	3.002
November	2.369	2.349	3.169	2.688	3.032
Desember	2.457	2.698	4.146	2.788	3.191

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan 2012-2017

Berdasarkan Tabel IV.2 diketahui bahwa variabel SPT Masa PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan memiliki rata-rata SPT

Masa PPN per bulannya sebanyak 2.724 SPT Masa PPN terlpaor. SPT Masa PPN terlapor minimum per bulan selama tahun 2012-2017 adalah 2.027, SPT Masa PPN terlapor maksimum per bulan selama tahun 2012-2017 adalah 4.146.

c. Surat Tagihan Pajak PPN (X3)

Data penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN perbulan, hasil deskripsi data penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN adalah seperti pada tabel berikut

Tabel IV.3 Surat Tagihan Pajak PPN

Bulan	Penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	28	33	178	28	39
Febuari	30	15	101	100	21
Maret	44	39	135	208	27
April	12	16	178	295	30
Mei	50	8	162	120	25
Juni	17	8	138	523	56
Juli	73	20	157	59	53
Agustus	20	172	129	99	56
September	27	455	118	28	22
Oktober	35	298	87	10	25
November	100	75	89	92	107
Desember	64	103	194	98	90

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan 2012-2017

Berdasarkan Tabel IV.3 diketahui bahwa variabel Surat Tagihan Pajak PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan memiliki rata-rata penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN per bulannya sebanyak 94 Surat Tagihan Pajak PPN. Penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN minimum per bulan selama tahun 2012-2017 adalah delapan , penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN maksimum per bulan selama tahun 2012-2017 adalah 523.

d. Penerimaan PPN

Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan perbulan dari Pajak Pertambahan Nilai, hasil deskripsi data penerimaan PPN adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Penerimaan PPN

Bulan	Penerimaan PPN (dalam miliar)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	17.581.	20.007	23.643	28.878	35.172
Febuari	12.555	11.341	15.559	25.987	39.552.
Maret	17.659	24.945	21.593	30.403	45.496
April	19.085	23.799	23.344	34.038	32.652
Mei	23.116	21.975	31.491	42.026	49.231
Juni	32.572	28.091	31.186	59.396	77.950
Juli	78.645	32.622	46.742	34.960	49.242
Agustus	32.354	27.940	47.893	50.298	66.347
September	34.713	40.410	63.700	56.095	60.109

Oktober	38.951	40.060	78.047	59.056	74.062
November	43.128	41.773	85.677	88.941	86.018
Desember	112.651	110.347	137.959	174.420	157.809

Berdasarkan Tabel IV.4 dapat diketahui bahwa variabel penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan memiliki rata-rata penerimaan PPN sebesar 49.188 M. Penerimaan minimum per bulan adalah 11.341 M, penerimaan maksimum per bulan 174.420 M.

4.2.2 Analisis Regresi Berganda

a. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila ingin mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik one sampel kolmogrov smirnov. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Pada gambar normal probability plot distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model asumsi normalitas tidak memenuhi uji asumsi normalitas [20].

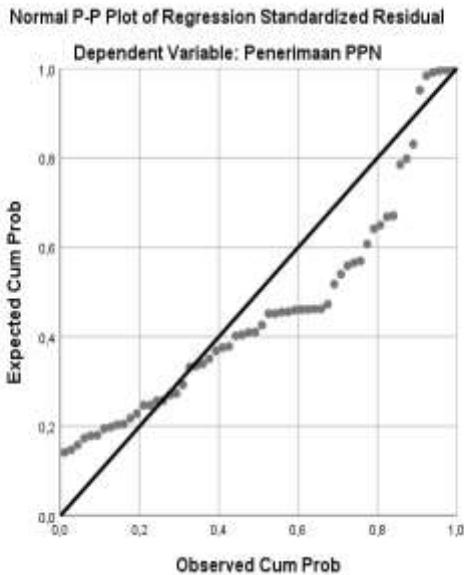
Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat tabel pada gambar berikut ini

Tabel IV.5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000020
	Std. Deviation	3,05058E+10
Most Extreme Differences	Absolute	,212
	Positive	,212
	Negative	,212
Test Statistic		,212
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.



Gambar IV.2 Uji Normalitas

Berdasarkan tabel IV.5 diperoleh nilai signifikan 0,212 yang berada di atas 0,005, hal ini menunjukkan nilai residual yang

normal. Selain itu berdasarkan grafik Normal P-Plot pada gambar IV.2 pola grafik normal terlihat dari titik- titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik Normal P- plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Varians Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerancenya lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulan yang didapat adalah terjadi multikolinieritas dan jika angka VIF ada yang melebihi 10 berarti terjadinya multikolinieritas [20].

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel IV.6 Uji Multikolinieritas

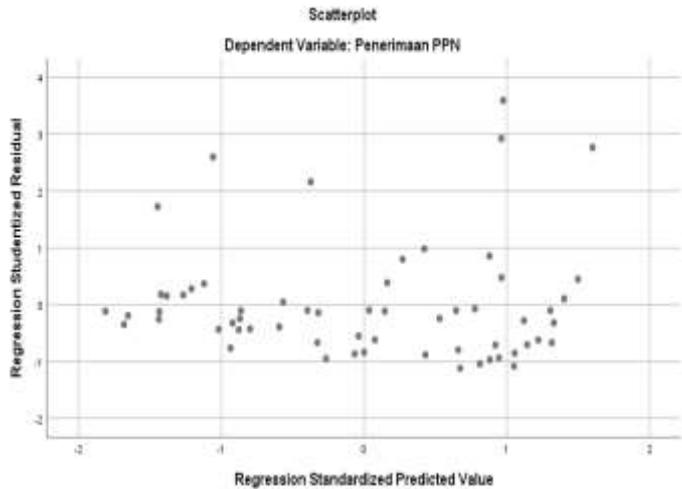
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			tolerance	VIF	
1	(Constant)	-3,057E+10		-1,021	,312			
	Jumlah PVP	16850079,97	6286421,064	,401	2,680	,010	,836	1,575
	SPT Masa PPN	6664150,734	14115822,87	,074	,472	,639	,570	1,755
	STP PPN	9155884,669	43698126,23	,027	,210	,835	,873	1,145

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel di atas hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Dengan melihat titik-titik yang tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas [20] .



Gambar IV.3 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Auto Korelasi

Uji Autokorelasi adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel pengganggu. Dengan menggunakan uji Durbin Watson (D-W) yang dimana menguji apakah dalam model regresi terjadi kesalahan pengganggu pada periode yang satu ke yang sebelumnya.

Tabel IV.7 Uji Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,453 ^a	,206	,163	3,131E+10	1,449

a. Predictors: (Constant), STP PPN, Jumlah PKP, SPT Masa PPN

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Bedasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,449 . Syarat agar terbebas dari autokorelasi, nilai Durbin-Watson harus berada diantara angka dL dan dU. Dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson 1,449 berada diantara 1,4443 dan 1,6889 hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi

b. Uji t

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel pengusaha kena pajak, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN secara parsial yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel IV.8 Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	1	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,057E+10	2,995E+10		-1,021	,312
	Jumlah PKP	16850079,97	6286421,064	,401	2,680	,010
	SPT Masa PPN	6664150,734	14115822,87	,074	,472	,639
	STP PPN	9155884,669	43698126,23	,027	,210	,835

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel IV.8 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel IV.7 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = (-30.572.704.866,34) + 16.850.079,97 X_1 + 6.664.150,734 X_2 + 9.155.864,669 X_3 + e$$

Pada model regresi yang telah didapatkan penulis dengan taksiran di atas, maka memperlihatkan bahwa taksiran intersep dimana $\beta_0 = (-30.572.704.866,34)$, taksiran $\beta_1 = 16.850.079,97$, taksiran $\beta_2 = 6.664.150,734$ dan taksiran $\beta_3 = 9.155.864,669$. Penjelasan yang terperinci dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar $(-30.572.704.866,34)$ menunjukkan bahwa jika variabel – variabel Independen (jumlah PKP, SPT Masa PPN dan STP PPN diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Penerimaan PPN) adalah sebesar 30.572.704.866,34.
- b. Koefisien variabel jumlah PKP (x_1) sebesar 16.850.079,97 berarti setiap kenaikan jumlah pengusaha kena pajak sebesar satu satuan, maka penerimaan PPN akan naik sebesar 16.850.079,97.
- c. Koefisien variabel SPT Masa PPN (x_2) sebesar 6.664.150,734 berarti setiap kenaikan SPT Masa PPN terlpaaor sebesar satu satuan, maka penerimaan PPN akan naik sebesar 6.664.150,734.

- d. Koefisien variabel STP PPN (x3) sebesar 9.155.864,669. berarti setiap kenaikan Surat Tagihan Pajak PPN sebesar satu satuan, maka penerimaan PPN akan naik sebesar 9.155.864,669.

c. Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (jumlah PKP (X1), SPT Masa PPN terlapor (X2), dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN (X3)) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (penerimaan PPN (Y)) yang dilakukan dengan cara melihat F hitung. Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika F hitung < F tabel Ho diterima dan Ha ditolak. Adapun hasil dari uji signifikansi simultan (uji F) dapat dilihat pada Tabel IV.8 sebagai berikut

Tabel IV.9 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,421E+22	3	4,736E+21	4,831	,005 ^b
	Residual	5,491E+22	56	9,805E+20		
	Total	6,911E+22	59			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

b. Predictors: (Constant), STP PPN, Jumlah PKP, SPT Masa PPN

Dari pengujian simultan (uji F) pada tabel IV.9 F hitung menghasilkan 4,831 yang lebih besar dari F tabel (4,831 > 2,77) . Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa jumlah PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Tagihan Pajak PPN yang dilaporkan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

d. Koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi atau R Square (R²). Apabila ingin mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,453 ^a	,206	,163	3,131E+10

a. Predictors: (Constant), STP PPN, Jumlah PKP, SPT Masa PPN

Berdasarkan tabel di atas nilai R adalah 0,453 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang “sedang” karena berada pada interval 0,40 – 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Makassar Selatan.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai R square yang diperoleh sebesar 0,206 yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan PPN dipengaruhi oleh variabel pengusaha kena pajak, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN 20,6% dan sisanya 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam

penelitian ini. Variabel yang peneliti maksud seperti Surat Ketetapan Pajak, Surat Setoran Pajak, Pemeriksaan pajak dan Penagihan pajak.

4.3 Hasil Analisis Data

Berikut ini adalah hasil pembahasan mengenai pengaruh pengusaha kena pajak (X1), SPT Masa PPN (X2), dan Surat Tagihan Pajak PPN (X3) terhadap penerimaan PPN (Y). Pembahasan Hasil Uji Parsial (Uji-t) dan Uji Simultan (Uji-F) sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh PKP terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel IV.8 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,680 dengan signifikansi 0,01. Rasio jumlah PKP berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah PKP akan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 2,680, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh PKP mengindikasikan bahwa apabila jumlah PKP mengalami kenaikan maka angka penerimaan PPN akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Nurrokhman (2014) yang menunjukkan bahwa PKP

terdaftar berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien bertanda positif. Dengan kata lain semakin banyak wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN.

Hipotesis tersebut juga didukung oleh data penambahan jumlah PKP pada Tabel IV.1 dimana jumlah PKP mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan 44% selama tahun 2012-2017 yang diiringi dengan kenaikan jumlah penerimaan PPN selama tahun 2012-2017.

4.3.2 Pengaruh SPT Masa PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel IV.8 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,472 dengan signifikansi 0,639. Rasio jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah SPT Masa PPN akan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 0,472, hal ini menunjukkan bahwa jumlah SPT Masa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Pandiangan (2014) yang menunjukkan SPT Masa PPN tidak

berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah SPT Masa PPN terlapor belum tentu mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN.

4.3.3 Pengaruh Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel IV.8 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,210 dengan signifikansi 0,835. Rasio jumlah STP PPN tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PPN, karena nilai signifikansi lebih besar 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah STP PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN”, ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Kresna (2013) yang menunjukkan STP PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penurunan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN belum tentu mempengaruhi kenaikan penerimaan PPN.

4.3.4 Pengaruh Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel IV.9 secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 4,831 dengan signifikansi 0,05. Rasio jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh

positif secara simultan terhadap penerimaan PPN, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan nilai signifikansi 0,05 hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 4,831, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak PPN memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh PKP mengindikasikan bahwa apabila jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak mengalami kenaikan secara simultan maka angka penerimaan PPN akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, Jumlah PKP, SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN”, dapat diterima.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak PPN terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Makassar Selatan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah PKP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah PKP, maka penerimaan PPN akan bertambah.
2. SPT Masa PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak SPT Masa PPN dilaporkan tidak meningkatkan penerimaan PPN. Hal ini disebabkan karena SPT Masa PPN dilaporkan jauh lebih kecil dari total SPT Masa PPN yang seharusnya dilaporkan dan banyaknya SPT Masa PPN yang Nihil, sehingga tidak memiliki pengaruh pada Penerimaan PPN.
3. Surat Tagihan Pajak PPN secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar PKP bermasalah yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. PKP yang bermasalah biasanya dicirikan dengan: (1) PKP yang tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, (2) PKP yang tidak mempunyai harta atau kekayaan lagi, dan (3) PKP yang tidak melakukan kegiatan usaha, tetapi tidak lapor. Oleh karena itu, presentase untuk

penagihan STP sangat kecil sehingga berdampak pada penerimaan realisasi PPN.

4. Jumlah PKP, SPT Masa PPN, dan Surat Tagihan Pajak PPN yang dilaporkan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Direktorat Jendral Pajak

Saran peneliti untuk DJP dan secara khusus untuk KPP Pratama Makassar Selatan adalah lebih giat melakukan sosialisasi kepada PKP untuk menanamkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan di akhir tahun baiknya dilakukan evaluasi terhadap penerimaan PPN sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel baru yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN antara lain Surat Ketetapan Pajak, Surat Setoran Pajak dan Pemeriksaan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, [Online]. Available: www.bps.go.id. [Diakses 28 Febuari 2018].
- [2] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*, 2009.
- [3] N. Nasrulloh , *Pengaruh Jumlah PKP dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN*, 2014.
- [4] Mardiasmo, “Perpajakan,” dalam *Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta, C.V ANDI OFFSET, 2016.
- [5] G. M. Giani, *Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN*, 2016.
- [6] Y. Kresna, *Pengaruh Self Assesment dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*, 2014.
- [7] A. Nurrokhman, *Analisis Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN*, 2014.
- [8] F. K. Lubis, *Pengaruh Jumlah PKP dan SPT Masa Terhadap Penerimaan PPN*, vol. 5 No 2, 2016.
- [9] D. S. U. Pandiangan, *Pengaruh SKPKB, Jumlah PKP, dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPN*, 2014.
- [10] S. Resmi, “Perpajakan Teori dan Kasus,” dalam *Edisi 8 Buku 2*, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2015.
- [11] Republik Indonesia, *PMK NO.197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*, Indonesia, 2013.

- [12] Online Pajak, [Online]. Available: www.online-pajak.com. [Diakses 29 Maret 2018].
- [13] Republik Indonesia, *PMK NO 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP, Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP*, Indonesia, 2015.
- [14] D. Lestari, *Pengaruh SPT Masa PPN dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN*, 2016.
- [15] J. Susyanti dan A. Dahlan, "PERPAJAKAN," dalam *Untuk Praktisi dan Akademisi*, Malang, Empatdua Media, 2015.
- [16] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 2009.
- [17] N. Awliarahman, *Pengaruh SPT Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*, 2016.
- [18] Sugiyono, "Metode Penelitian," dalam *Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2016.
- [19] R. Indrawan dan P. Yaniawati, "Metodologi Penelitian," dalam *Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung, PT Refika Adiatama, 2014.
- [20] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- [21] Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, "FEBUNISMA," [Online]. Available: fe.unisma.ac.id. [Diakses 27 April 2018].
- [22] Sutrisno, dalam *Metode Penelilyian Kualiatatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.

LAMPIRAN